

TAJUK RENCANA

Kabinet Gemuk atau Zaken?

PERHATIAN publik kini sedang tertuju pada puluhan nama tokoh, mulai dari politisi, artis, hingga akademisi yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke rumah kediamannya di Jalan Kartanegara IV, Kebayoran, Jakarta. Mereka dijanjikan menduduki jabatan menteri dan wakil menteri kabinet serta kepala badan negara. Hampir semua tokoh yang dipanggil berbicara terus terang kepada media tentang tawaran menduduki jabatan menteri serta wakil menteri. Wajah-wajah mereka tampak sumringah karena bakal menduduki jabatan penting di kelembagaan negara.

Tak kurang 108 tokoh telah dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto untuk ditanya komitmennya membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan nanti. Semua yang dipanggil seperti yang tak ada yang menolak tawaran Prabowo Subianto. Andai semua yang dipanggil Prabowo benar-benar menjabat sebagai menteri serta wakil menteri dan kepala badan, dipastikan kabinet yang disusun Prabowo tergolong kabinet gemuk, bukan ramping. Lantas apa salahnya?

Kiranya tak ada yang salah sepanjang kabinet tersebut efektif dan mampu menjaga integritas sebagai abdi negara yang tidak korupsi. Sebelumnya, Prabowo menyatakan akan membentuk zaken kabinet, atau kabinet yang diisi orang-orang profesional, bisa berasal dari partai maupun luar partai. Zaken kabinet memang tidak selalu diawakani dengan kabinet gemuk. Bahkan, boleh jadi, zaken kabinet sekaligus juga kabinet gemuk. Apalagi, sebelumnya telah ada revisi UU Kementerian Negara yang notabene mengubah nomenklatur menjadi lebih luas yang membuka kemungkinan bertambahnya personel di kementerian.

Kita tentu tak hendak membenarkan antara zaken kabinet dengan kabinet gemuk. Hemat kita, kabinet gemuk merupakan konsekuensi dari gemuknya koalisi yang dibangun Prabowo Subianto. Hampir semua partai bergabung dengan Prabowo.

Sementara publik masih menunggu pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto sebelum pelantikan Presiden/wakil presiden 20 Oktober nanti. Apakah PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo? Kita masih belum mengerti.

Nasdem yang tidak menyodorkan kadernya di kabinet Prabowo, pun menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo dan tidak memposisikan diri sebagai kekuatan oposisi. Kita sangat khawatir bila tidak ada kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Kita membutuhkan bekerjanya mekanisme check and balances sehingga demokrasi benar-benar berjalan sehat dan kondusif, bukan pemerintahan yang tanpa kontrol. Dalam konteks itulah kita membutuhkan kekuatan oposisi.

Dari situ kita mengharapkan PDI Perjuangan menjadi kekuatan penyeimbang, apalagi menguasai suara terbanyak di parlemen. Pemerintah harus dikontrol agar jalannya tidak melenceng, atau lebih tepatnya on the track. Dengan tidak menempatkan kadernya di kabinet Prabowo kita yakin PDIP menjadi titik sentral kekuatan oposisi. Namun, tanpa bermaksud mendahului, kita berharap pertemuan Megawati-Prabowo menghasilkan formula yang efektif dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Kita tidak memungkir, dalam penyusunan kabinet akan banyak kepentingan yang masuk, utamanya kepentingan politik akomodatif. Pun tidak bisa mengelak bahwa susunan kabinet nanti merupakan cerminan kepentingan politik atau dalam bahasa praktisnya bagi-bagi jabatan—meski tidak seluruhnya. Namun, begitu kabinet terbentuk, maka personel yang duduk di jabatan menteri, wakil menteri maupun kepala lembaga negara, harus bersikap profesional dan harus menanggalkan kepentingan parpolnya. Mereka harus solid dan menempatkan diri sebagai pembantu presiden.

'Politik Rangkul' ala Prabowo

PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto sedang berusaha menepati janjinya untuk merangkul semua kalangan pada kabinetnya nanti. Prabowo tentu ingin mengawali masa jabatannya dengan manis, sejak awal pasca dinyatakan unggul melalui hitung cepat pasangan Prabowo-Gibran berjanji untuk mengayomi seluruh rakyat serta merangkul semua unsur dan kekuatan dalam pemerintahannya.

Menjelang pelantikan, pada 14 Oktober 2024 Prabowo telah memanggil calon Menteri ke kediamannya. Kabinet pemerintahan Prabowo diprediksi bakal igemuki, akan ada 46 kementerian, melebihi kabinet pemerintahan Jokowi sebanyak 34 kementerian.

Pada September 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ada beberapa point utama yang mendapat perubahan, tiga diantaranya Pertama, penghapusan penjelasan dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara kedua, revisi Pasal 15 UU Kementerian Negara yang mengatur secara khusus jumlah kementerian sebanyak 34. Ketiga, adanya penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan UU pada Ketentuan Penutup.

Revisi UU Kementerian Negara juga menambah beberapa pasal antara lain Pasal 6A berisi tentang pembentukan kementerian tersendiri, Pasal 9A memberi wewenang kepada Presiden untuk mengubah unsur organisasi berdasarkan kebutuhan pemerintah, serta Pasal 25 yang mengatur tentang hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga.

Revisi Undang-undang tersebut telah membuka peluang Prabowo untuk bisa membentuk kabinet yang gemuk bahkan sampai 46 kementerian. Harapan dari penghapusan pembatasan jumlah kementerian untuk memberikan keleluasaan lebih besar pada Presiden Prabowo dalam menentukan jumlah kementerian, baik memecah atau menggabungkan lembaga kementerian.

Nantinya akan banyak kementerian yang mengalami penggabungan dan ju-

Alfian Dj

ga pemisahan, seperti halnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan dipecah menjadi tiga kementerian, begitu juga kementerian PUPR yang pada pemerintahan Jokowi telah digabung nantinya akan dipisah kembali oleh Prabowo menjadi dua kementerian.

Penambahan lembaga kementerian akan berdampak pada banyak hal, tidak hanya terkait anggaran negara, akan tetapi penambahan jumlah kementerian juga berdampak pada pengaturan per-



KR-JOKO SANTOSO

pindahan ASN, terutama pada kementerian yang mengalami perubahan. Di samping itu penambahan kementerian juga berdampak pada jumlah komisi di DPR RI dari semula 11 bisa saja nanti bertambah menjadi 13 Komisi.

Banyaknya lembaga kementerian merupakan bagian dari 'Politik Rangkul' yang sedang dimainkan Prabowo, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjalin kerjasama dengan banyak kalangan. Prabowo tentu membutuhkan ketenangan dan juga dukungan parlemen untuk lima tahun ke depan. Hal itu diperlukan agar stabilitas politik dapat terus terjaga dan pemerintahan diharapkan berjalan efektif. Data yang dikeluarkan oleh Survei indikator menunjukkan bahwa 73,3 persen publik menyetujui dan menyambut positif langkah pembentukan KIM plus yang diinisiasi Prabowo.

Kabinet yang akan dibentuk Prabowo

tidak hanya mengakomodir parpol saja, tetapi juga melibatkan sejumlah tokoh dari kalangan profesional, birokrat, akademisi, pejabat aktif polri dan juga para tokoh ormas, semua berharap 'Politik Rangkul' yang sedang dimainkan Prabowo dapat berdampak positif terhadap kemajuan bangsa yang partisipatif, kuat dan saling menjaga satu dan lainnya.

Harapan

Di sisi lain, untuk menjaga dinamisasi politik serta memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan roda pemerintahan, masih diperlukan adanya partai oposisi. A adanya partai oposisi akan menghadirkan pemerintah yang akuntabel dan terbuka terhadap kritik serta saran sehingga janji Prabowo untuk menghapus kemiskinan dan korupsi di bumi Indonesia benar-benar terwujud. Semua rakyat Indonesia menggantung asa pada pemerintahan baru nanti dan berharap cita-cita luhur bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 45, yaitu untuk membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Mewujudkan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial benar benar dapat terwujud. (*)

Dr Alfian Dj MH, Staf Pengajar
Madrasah Muallimin Yogyakarta,
Sekretaris Majelis Hukum HAM PP
Muhammadiyah.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaualatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaualatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaualatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisaris Utama: Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE, MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Yati Prabowo SSos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Joeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dr Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussyahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Efly Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaualatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00/ baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Netralitas Pemerintah Desa

Dwi Cahya Maristyan

DUGAAN pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah mulai marak ditemukan. Apalagi saat ini masa kampanye, yang telah dimulai 25 September 2024 lalu dan berakhir 23 November 2024 mendatang. Salah satu dugaan pelanggaran dilaporkan sejumlah warga Kabupaten Sleman yang menamakan Front Masyarakat Madani ke Bawaslu Sleman. Aduan tersebut terkait netralitas 4 oknum lurah berfoto dengan salah satu pasangan calon. Bawaslu Sleman diminta segera menindaklanjuti aduan tersebut.

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai keadaan dan sikap netral, tidak memihak, atau bebas. Sementara Marbun dalam Sri Hartini (2009) menjelaskan netralitas yaitu sikap terbebas memihak kepentingan politik dan tidak berperan dalam proses politik partai politik tertentu. Undang-undang (UU) Desa Nomor 6/2014 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah (pasal 29j).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Pasal 70 ayat 1c dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. Sementara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13/2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pasal 62 ayat 1c disebutkan dalam kegiatan kampanye, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye, dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

belum pemahannya regulasi yang ada.

Apakah sebaiknya dilakukan pemerintah desa? Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, meningkatkan pemahaman terhadap persoalan pemilihan, menumbuhkan kesadaran untuk terlibat aktif terutama mencegah timbulnya pelanggaran, terlibat aktif memerangi penyusutan informasi yang mungkin terjadi dalam proses kampanye dan menumbuhkan kesadaran untuk menolak segala bentuk suap politik (money politics) yang melanggar norma hukum negara dan agama. Masyarakat dapat terlibat aktif meminimalisasi pemerintah desa tidak melakukan pelanggaran dengan memberikan informasi kegiatan yang hendak dihadiri paslon. Selain itu, dapat pula menegur pemerintah desa ketika menghadiri kegiatan yang diadakan paslon.

Melalui pemahaman pemerintah desa terhadap netralitas dan masyarakat aktif ambil bagian agar pemerintah desa untuk tetap menjaga netralitasnya dapat menumbuh-kembangkan kesadaran proses politik dan pembangunan politik bangsa dan negara yang bertanggungjawab dan demokratis. (*)

Dwi Cahya Maristyan SPsi,
Mantan Pengawas Pemilu
Kabupaten Bantul.

Pojok KR

Presiden terpilih Prabowo panggil calon menteri/wakil menteri.

- Kabinetnya jadi makin gemuk.

Hakim agung nonaktif Gazalba Saleh divonis 10 tahun penjara.

- Bersih-bersih MA belum usai.

DPR membentuk Badan Aspirasi Masyarakat.

- Padahal DPR sudah merepresentasikan masyarakat.

Berita